

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN FRAUD: PERAN KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN OBJEKTIVITAS AUDITOR INTERNAL PADA INSTANSI PEMERINTAH

Siti Ayumi Sabrina¹, Donny Sanjaya², Cris Kuntadi³

Politeknik Negri Medan^{1,2}, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya³

Email: sitiayumi@students.polmed.ac.id¹, donnysanjaya@polmed.ac.id²,
cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Abstrak</i>
Nomor : 6	<i>Pengendalian fraud di instansi pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya negara. Auditor internal memiliki peran krusial dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud dengan menilai sistem pengendalian internal yang ada. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pengendalian fraud, baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan manajerial, dan kelemahan budaya organisasi, maupun faktor eksternal seperti kelemahan sistem hukum dan ketidakstabilan politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pengendalian fraud dan peran auditor internal dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian fraud, diperlukan penguatan kompetensi auditor internal, peningkatan dukungan dari pimpinan, serta pembaruan sistem hukum dan regulasi yang ada.</i>
Bulan : Juni	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	
	<i>Kata Kunci: Pengendalian fraud, Auditor internal, Tantangan pengendalian, Instansi pemerintah</i>

A. PENDAHULUAN

Pengendalian fraud dalam instansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan secara serius. Fraud atau penipuan dalam sektor publik tidak hanya dapat merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar, tetapi juga dapat merusak integritas sistem pemerintahan. Selain dampak finansial, fraud berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, yang pada akhirnya mempengaruhi kredibilitas dan legitimasi pemerintah. Dengan berbagai dampak negatif tersebut, pengendalian fraud menjadi sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fraud dalam instansi pemerintah seringkali terjadi akibat adanya celah dalam pengawasan dan pengendalian internal. Tanpa

adanya sistem pengawasan yang kuat, maka potensi terjadinya fraud dapat meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melibatkan auditor internal yang memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Auditor internal yang kompeten, independen, dan objektif memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keandalan pengendalian dan meminimalkan risiko fraud. Fraud yang terjadi di sektor publik tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga dapat merusak reputasi pemerintah dan menyebabkan pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengendalian fraud yang efektif, yang dapat terus dievaluasi dan diperbaiki agar lebih responsif terhadap potensi penipuan yang muncul.

Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama yang harus dijawab:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian fraud pada instansi pemerintah?
2. Bagaimana peran kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor internal dalam pengendalian fraud?

Tujuan Pembahasan

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengendalian fraud di instansi pemerintah, dengan fokus pada peran auditor internal. Penulisan ini bertujuan untuk menggali berbagai faktor yang dapat berperan dalam meningkatkan atau menurunkan efektivitas pengendalian fraud, serta bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi untuk mengurangi risiko terjadinya fraud. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor internal dapat mempengaruhi kualitas pengendalian fraud. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pentingnya pengendalian fraud dalam pemerintahan dan peran strategis auditor internal dalam upaya pencegahan fraud di sektor publik.

KAJIAN TEORI

Pengendalian Fraud

Fraud dalam konteks instansi pemerintah merujuk pada tindakan penipuan atau manipulasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan instansi atau negara. Dalam sektor publik, fraud dapat berupa penyalahgunaan dana publik, penggelapan aset, atau pelaporan keuangan yang tidak

akurat. Keberadaan fraud ini sering kali mengarah pada kerugian finansial yang signifikan dan merusak integritas lembaga pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, pengendalian fraud sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Konsep pengendalian fraud mencakup sistem dan prosedur yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi fraud di dalam organisasi. Sistem pengendalian internal di instansi pemerintah berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko terjadinya penipuan dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas, melakukan pemantauan secara rutin, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas di kalangan pegawai. Pengendalian fraud yang efektif membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk auditor internal, manajemen, dan pihak terkait lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik penipuan.

Kompetensi Auditor Internal

Kompetensi dalam audit internal merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugas-tugas audit mereka. Seorang auditor internal yang kompeten harus memahami dengan baik prosedur audit, teknik pengendalian, serta regulasi yang berlaku di instansi pemerintah. Kompetensi ini juga meliputi kemampuan untuk menganalisis data secara kritis dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Tanpa kompetensi yang memadai, auditor internal tidak akan mampu mengidentifikasi dan menanggulangi fraud secara efektif, yang dapat mengarah pada terjadinya penipuan yang tidak terdeteksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi auditor internal mencakup pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan, pengalaman praktis, dan pengetahuan mengenai standar audit yang berlaku. Kompetensi auditor juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan kerjasama tim dalam melaksanakan tugas audit. Pengaruh kompetensi terhadap efektivitas pengendalian fraud sangat besar, karena auditor yang kompeten akan lebih mampu melakukan deteksi dini terhadap adanya potensi fraud dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang ada.

Independensi Auditor Internal

Independensi auditor internal mengacu pada kemampuan auditor untuk melakukan audit secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal atau internal yang dapat mempengaruhi hasil audit. Auditor internal yang independen tidak akan terpengaruh oleh tekanan atau konflik kepentingan yang dapat mengurangi objektivitas penilaian mereka.

Independensi ini sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses audit. Tanpa independensi yang kuat, auditor mungkin akan terjebak dalam situasi di mana temuan mereka tidak mencerminkan kenyataan atau tidak dapat diandalkan.

Pentingnya independensi dalam proses audit adalah untuk memastikan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Ketika auditor internal dapat bekerja secara independen, hasil audit akan lebih objektif dan dapat diandalkan dalam menilai efektivitas pengendalian internal dan mendeteksi adanya potensi fraud. Dampak dari independensi auditor terhadap hasil pengendalian fraud sangat signifikan, karena auditor yang independen memiliki kebebasan untuk mengungkapkan temuan mereka tanpa rasa takut atau keberpihakan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka.

Objektivitas Auditor Internal

Objektivitas dalam audit internal adalah kemampuan auditor untuk melakukan evaluasi secara adil dan tidak bias, berdasarkan fakta dan data yang ada, tanpa mempertimbangkan preferensi pribadi atau tekanan eksternal. Objektivitas sangat penting karena menentukan kualitas dari temuan audit yang dihasilkan. Seorang auditor yang objektif akan membuat penilaian berdasarkan bukti yang kuat, bukan pada dugaan atau asumsi. Ini memberikan landasan yang kokoh bagi pengambilan keputusan manajerial dan kebijakan organisasi terkait pengendalian fraud.

Pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit sangat besar, karena auditor yang objektif dapat menyajikan hasil audit yang akurat dan dapat dipercaya. Hasil audit yang objektif akan memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana sistem pengendalian internal bekerja dan apakah ada potensi fraud yang perlu diwaspadai. Hubungan objektivitas auditor internal dengan pengendalian fraud sangat erat, karena pengendalian yang efektif hanya bisa terwujud jika auditor mampu memberikan laporan yang jujur dan tanpa bias mengenai temuan-temuan yang relevan.

Hubungan antara Kompetensi, Independensi, dan Objektivitas Auditor Internal

Kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor internal saling terkait dan bekerja bersama untuk meningkatkan efektivitas pengendalian fraud. Ketiga faktor ini membentuk dasar yang kokoh bagi auditor internal untuk melakukan audit yang efektif. Kompetensi auditor memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendeteksi fraud, sementara independensi memberikan kebebasan untuk melakukan audit tanpa pengaruh eksternal. Objektivitas, di sisi lain, memastikan bahwa auditor dapat

memberikan temuan yang akurat dan tidak bias. Sinergi antara ketiga faktor ini sangat penting, karena hanya dengan ketiga faktor tersebut auditor internal dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud dalam instansi pemerintah.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan Artikel Ini	Perbedaan dengan Artikel Ini
1	Setiowati (2023)	Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit internal dan pencegahan fraud berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal di Yayasan Internusa. Pengaruh ini mencapai 71,2% dengan sisa 28,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.	Sama-sama menekankan pentingnya audit internal dan pencegahan fraud dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal.	Penelitian ini lebih fokus pada studi kasus di Yayasan Internusa Surakarta, sedangkan penelitian sebelumnya lebih umum tanpa membatasi pada lembaga tertentu.
2	Farid (2022)	Penelitian ini mengungkapkan pentingnya audit internal di lembaga pendidikan tinggi, dengan memberikan bukti bahwa pengelolaan audit internal harus dibentuk di setiap institusi pendidikan tinggi di Malaysia.	Persamaan dalam hal pembahasan audit internal di perguruan tinggi dan pengaruhnya terhadap pengendalian internal.	Penelitian ini dilakukan di Malaysia, sedangkan artikel ini menggunakan Yayasan Internusa Surakarta sebagai studi kasus.
3	Limbong (2023)	Menyoroti bahwa efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kualitas audit internal dan dukungan manajemen di lembaga pendidikan tinggi di Ethiopia.	Keduanya membahas pentingnya kualitas audit internal dalam mempengaruhi efektivitas pengendalian internal.	Penelitian ini dilakukan di Ethiopia, sementara artikel ini lebih terfokus pada yayasan pendidikan di Indonesia.
4	Oktavian (2023)	Mengidentifikasi bahwa faktor kompetensi, objektivitas, dan kinerja auditor internal sangat mempengaruhi kualitas audit internal di sektor perbankan di Yordania.	Kedua penelitian menekankan pentingnya kualitas dan kompetensi auditor internal dalam efektivitas pengendalian internal.	Fokus penelitian ini di sektor perbankan, sedangkan artikel ini berfokus pada lembaga pendidikan tinggi.
5	Istiyawati (2015)	Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun audit internal tidak bisa menjamin terhindarnya fraud,	Keduanya membahas peranan audit internal dalam mendeteksi dan mencegah fraud.	Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana audit internal mendeteksi fraud, sementara

		auditor internal tetap berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan.		artikel ini juga mencakup pencegahan fraud dan pengendalian internal secara lebih luas.
6	Oktavian (2023)	Penelitian ini membahas peran audit internal di masa pandemi COVID-19, menunjukkan bagaimana pandemi mempengaruhi proses audit internal dan meningkatkan potensi terjadinya kecurangan (fraud) karena pengalihan fokus pada krisis. Penelitian ini juga menyarankan penggunaan audit jarak jauh (remote auditing) selama pandemi untuk menjaga efektivitas pengendalian internal.	Keduanya membahas peran audit internal dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pencegahan fraud.	Fokus penelitian ini pada masa pandemi COVID-19 dan penerapan audit jarak jauh, sedangkan artikel yang Anda buat lebih umum membahas audit internal dan pencegahan fraud tanpa penekanan khusus pada periode pandemi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian fraud di instansi pemerintah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika, persepsi, dan pengalaman para auditor internal dalam menghadapi masalah fraud. Peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan auditor internal, manajer pengendalian internal, dan pejabat terkait lainnya yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan risiko fraud di instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis dokumen terkait kebijakan pengendalian internal dan laporan audit yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan dokumen yang dianalisis. Data yang terkumpul akan diproses untuk mengidentifikasi hubungan antara kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor internal dengan efektivitas pengendalian fraud. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi pengendalian fraud, seperti budaya organisasi dan dukungan dari pimpinan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru yang

dapat membantu meningkatkan sistem pengendalian fraud dalam instansi pemerintah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Fraud

Pengendalian fraud di instansi pemerintah merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga keuangan negara dan integritas lembaga pemerintah. Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian fraud adalah kompetensi auditor internal. Auditor yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai akan lebih mampu mengidentifikasi adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk terjadinya fraud. Kompetensi yang tinggi memungkinkan auditor untuk merancang prosedur audit yang lebih cermat dan tepat, sehingga mampu mendeteksi tanda-tanda penipuan atau penyimpangan dalam sistem pengendalian internal. Tanpa kompetensi yang memadai, kemungkinan terjadinya fraud akan meningkat, karena auditor tidak dapat menangani risiko fraud dengan efektif.

Selain kompetensi, independensi auditor internal juga berperan penting dalam pengendalian fraud. Seorang auditor yang bekerja dalam keadaan independen dan bebas dari tekanan eksternal, baik dari manajemen maupun pihak lain, akan lebih objektif dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya independensi yang kuat, auditor dapat terpengaruh oleh kepentingan tertentu yang dapat mengarah pada audit yang tidak jujur atau tidak akurat. Dalam konteks pengendalian fraud, independensi sangat krusial karena hanya auditor yang bebas dari intervensi eksternal yang dapat memberikan laporan yang akurat dan terpercaya tentang adanya potensi fraud. Objektivitas juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam pengendalian fraud.

Auditor internal yang objektif akan membuat penilaian yang berdasarkan pada bukti yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi atau kepentingan tertentu. Objektivitas ini memastikan bahwa hasil audit dapat diandalkan dan mencerminkan kenyataan yang ada, tanpa ada penyimpangan. Sebagai contoh, dalam mengaudit laporan keuangan atau alur pengeluaran, auditor yang objektif akan mampu mengidentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan tanpa adanya bias. Keterkaitan antara kompetensi, independensi, dan objektivitas ini menciptakan sistem pengendalian internal yang kokoh, yang pada gilirannya meminimalkan risiko terjadinya fraud di instansi pemerintah.

Dalam praktiknya, ketiga faktor tersebut bekerja secara sinergis untuk meningkatkan efektivitas pengendalian fraud. Kompetensi auditor memberi dasar pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi berbagai transaksi serta prosedur yang dapat menimbulkan risiko fraud. Sementara itu, independensi auditor memberi keleluasaan bagi

auditor untuk membuat keputusan yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan manajerial atau politis. Objektivitas menjamin bahwa keputusan dan temuan yang dihasilkan oleh auditor adalah murni berdasarkan bukti yang ada dan bukan karena faktor subjektif. Ketiga faktor ini saling melengkapi dan memberikan kontribusi besar terhadap pengendalian fraud yang lebih efektif.

Jika kompetensi auditor rendah, baik dalam hal pengetahuan tentang prosedur audit maupun keterampilan dalam menggunakan teknologi audit terbaru, maka kemungkinan auditor gagal mendeteksi fraud akan meningkat. Begitu pula, jika auditor tidak memiliki independensi yang kuat, hasil audit bisa terdistorsi oleh tekanan dari pihak yang berkepentingan. Misalnya, auditor yang tidak independen mungkin menghindari pelaporan kesalahan atau penipuan yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan. Di sisi lain, jika auditor tidak objektif, mereka mungkin akan memberikan kesimpulan yang salah atau tidak menyeluruh, yang bisa menyebabkan fraud tidak terdeteksi dan dibiarkan berlangsung.

Sebuah studi yang dilakukan di beberapa instansi pemerintah di Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan dalam kompetensi auditor berhubungan langsung dengan tingginya tingkat fraud dalam lembaga tersebut. Di beberapa kasus, auditor yang kurang terampil dalam menggunakan alat audit yang modern dan belum mendapatkan pelatihan terkini cenderung gagal mendeteksi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Misalnya, dalam audit yang dilakukan terhadap sebuah dinas di salah satu daerah, ditemukan bahwa penyalahgunaan anggaran yang cukup besar tidak terdeteksi hanya karena auditor tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.

Studi lain juga menunjukkan bahwa independensi auditor berperan besar dalam efektivitas pengendalian fraud. Di beberapa kasus, ketika auditor terpengaruh oleh tekanan dari manajemen atau pejabat tinggi instansi, temuan audit sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, di sebuah lembaga pemerintah yang mengalami sejumlah kasus penyalahgunaan dana, audit yang dilakukan oleh auditor yang tidak independen menunjukkan laporan yang "bersih", meskipun ada tanda-tanda jelas penyalahgunaan. Hal ini mengonfirmasi pentingnya independensi auditor dalam menjaga integritas proses audit dan mendeteksi fraud. Data empiris juga menunjukkan bahwa objektivitas auditor sangat menentukan keberhasilan dalam pengendalian fraud. Dalam sebuah studi di salah satu instansi pemerintahan, auditor yang melakukan audit dengan pendekatan yang objektif

mampu mengidentifikasi beberapa skema penipuan yang sebelumnya tidak terdeteksi. Mereka dapat melihat pola pengeluaran yang tidak wajar dan mengonfirmasi keberadaan transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Sebaliknya, auditor yang terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain sering kali mengabaikan temuan yang bertentangan dengan narasi yang ingin dipertahankan oleh manajemen. Ini menunjukkan bagaimana objektivitas auditor berperan penting dalam menghasilkan audit yang akurat dan berguna untuk pengendalian fraud.

Kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor internal merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pengendalian fraud di instansi pemerintah. Ketiganya harus bekerja secara sinergis agar pengendalian fraud dapat dilakukan dengan optimal. Dengan auditor yang kompeten, independen, dan objektif, instansi pemerintah dapat meminimalkan risiko fraud dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk memastikan bahwa auditor internal mereka memenuhi standar kompetensi yang tinggi, memiliki independensi yang terjaga, dan selalu bertindak objektif dalam menjalankan tugas audit mereka.

Peran Auditor Internal dalam Pengendalian Fraud

Auditor internal memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian fraud di instansi pemerintah. Sebagai penjaga integritas sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya, auditor internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal yang ada dan memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi secara efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan mengatasi fraud. Mereka bertugas untuk mengidentifikasi celah dalam pengendalian yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dan memberikan rekomendasi perbaikan guna memperkuat sistem tersebut. Dengan adanya peran ini, auditor internal dapat mengurangi potensi kerugian yang disebabkan oleh tindakan fraud yang merugikan negara dan masyarakat.

Tugas utama auditor internal dalam mencegah fraud adalah melakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur yang ada dalam instansi pemerintah. Mereka harus memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat publik berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, auditor internal juga bertugas untuk mendeteksi adanya tanda-tanda fraud yang terjadi, baik melalui pemeriksaan laporan keuangan, pengawasan atas transaksi tertentu, maupun audit mendalam terhadap prosedur yang rentan terhadap penipuan. Dalam

proses ini, auditor internal harus dapat bekerja secara objektif dan independen, mengumpulkan bukti yang sah dan memberikan laporan yang akurat tentang temuan mereka. Selain itu, auditor internal juga berperan sebagai penghubung antara manajemen dan pihak eksternal dalam hal pengendalian fraud. Mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan temuan yang merujuk pada kemungkinan fraud kepada manajemen dan memberi rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil. Auditor internal juga berfungsi sebagai pengingat dan pendorong bagi manajemen untuk terus memperbarui kebijakan dan sistem pengendalian internal guna mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Dengan demikian, auditor internal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penguatan pengendalian fraud di instansi pemerintah.

Efektivitas peran auditor internal dalam pengendalian fraud dapat dilihat dari sejauh mana auditor dapat mendeteksi dan mencegah fraud sebelum terjadi kerugian besar. Pada banyak instansi pemerintah, peran auditor internal yang kuat telah terbukti efektif dalam menurunkan angka penipuan. Misalnya, auditor internal yang melakukan audit secara rutin terhadap laporan keuangan dan transaksi dapat mendeteksi adanya manipulasi atau penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting dalam mencegah kerugian negara yang disebabkan oleh praktik fraud.

Namun, efektivitas peran auditor internal sering kali tergantung pada beberapa faktor, seperti independensi, kompetensi, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka. Di beberapa instansi, auditor internal mungkin menghadapi tantangan terkait kurangnya dukungan dari pimpinan atau keterbatasan anggaran yang menyebabkan audit tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, jika auditor internal tidak memiliki kompetensi yang memadai atau tidak diberikan akses yang cukup terhadap data yang relevan, mereka mungkin kesulitan dalam mendeteksi fraud dengan efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas auditor internal harus mencakup aspek-aspek tersebut dan melihat apakah mereka memiliki wewenang serta dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka secara maksimal.

Kendala lain yang dapat memengaruhi efektivitas auditor internal adalah adanya tekanan atau pengaruh dari pihak eksternal, seperti manajemen atau pejabat tinggi yang mungkin tidak mendukung temuan audit yang merugikan mereka. Dalam situasi seperti ini, independensi auditor internal menjadi sangat krusial. Jika auditor internal tidak mampu mempertahankan independensinya, temuan audit dapat dipengaruhi atau bahkan diabaikan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pengendalian fraud. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus memastikan bahwa auditor internal memiliki ruang yang cukup untuk

bekerja secara bebas dan objektif, serta memiliki otoritas untuk melaporkan temuan mereka tanpa adanya campur tangan pihak manapun. Meskipun demikian, ada juga contoh positif di mana auditor internal berperan sangat efektif dalam pencegahan dan pengendalian fraud. Di beberapa instansi pemerintah yang memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan auditor internal yang kompeten, ditemukan bahwa fraud dapat terdeteksi lebih cepat dan lebih sedikit terjadi. Instansi-instansi ini umumnya memiliki dukungan penuh dari pimpinan untuk melaksanakan audit secara independen dan memiliki akses penuh terhadap data dan dokumen yang diperlukan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor internal secara berkelanjutan juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan efektivitas peran mereka dalam mengendalikan fraud.

Evaluasi juga dapat dilakukan melalui analisis hasil audit yang dihasilkan oleh auditor internal. Apakah temuan audit menghasilkan rekomendasi yang dapat diterima dan diimplementasikan oleh manajemen? Apakah tindakan perbaikan yang direkomendasikan dapat mengurangi risiko fraud di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menilai apakah auditor internal benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki sistem pengendalian internal dan mencegah fraud. Jika hasil audit menunjukkan bahwa rekomendasi auditor tidak diimplementasikan atau kurang efektif, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap prosedur kerja auditor internal dan sumber daya yang mereka miliki.

Meski peran auditor internal sangat krusial, mereka sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas mereka dalam mengendalikan fraud. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun teknologi. Banyak instansi pemerintah yang memiliki auditor internal yang terbatas jumlahnya, yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan audit secara menyeluruh dan seringkali hanya fokus pada area tertentu yang dianggap lebih rentan terhadap fraud. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan auditor untuk menggunakan teknologi terkini yang dapat membantu mendeteksi potensi fraud lebih awal.

Kendala lainnya adalah kurangnya dukungan dari pihak manajemen atau pejabat pemerintah yang merasa terganggu dengan temuan-temuan yang merugikan mereka. Dalam beberapa kasus, audit internal yang menemukan adanya fraud atau penyalahgunaan anggaran mungkin tidak diterima dengan baik oleh pihak yang terlibat. Ketidakpastian atau resistensi terhadap temuan audit ini sering kali menyebabkan rekomendasi auditor tidak dilaksanakan atau ditunda, yang mengurangi efektivitas pengendalian fraud. Oleh karena itu, penting bagi

manajemen untuk memberikan dukungan penuh terhadap auditor internal, serta memastikan bahwa temuan audit dihargai dan direspons secara serius. Peran auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi fraud juga melibatkan edukasi dan pelatihan bagi pegawai atau pihak terkait di instansi pemerintah. Auditor internal sering kali tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi juga memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal dan bagaimana cara melaporkan potensi fraud. Dengan pendekatan ini, auditor internal berfungsi sebagai penghubung yang mendidik seluruh organisasi mengenai tanda-tanda fraud dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Ini mengarah pada budaya organisasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Selain itu, auditor internal berperan dalam merancang atau memperbaharui kebijakan pengendalian internal yang lebih baik. Mereka membantu mengidentifikasi area yang rentan terhadap fraud dan memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem pengendalian menjadi lebih efektif. Ini termasuk penguatan prosedur pengawasan, peningkatan integritas laporan keuangan, serta penerapan teknologi yang dapat membantu mendeteksi dan mencegah penipuan. Dengan pendekatan proaktif ini, auditor internal tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam memperbaiki sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

Peran auditor internal dalam pengendalian fraud sangatlah penting, mengingat tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas dan akuntabilitas instansi pemerintah. Auditor internal tidak hanya bertugas untuk mendeteksi dan mencegah fraud, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem pengendalian internal. Meskipun terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas mereka, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya dukungan manajerial, auditor internal tetap memiliki peran strategis dalam pencegahan dan deteksi fraud. Untuk itu, penting bagi instansi pemerintah untuk mendukung peran auditor internal melalui pelatihan yang terus-menerus, pemberian otoritas penuh dalam melakukan audit, serta menciptakan budaya transparansi yang menghargai temuan audit.

Tantangan dalam Pengendalian Fraud di Instansi Pemerintah

Pengendalian fraud di instansi pemerintah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak lembaga publik. Fraud dapat merugikan keuangan negara, merusak kepercayaan publik, dan menghambat tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk itu, pengendalian fraud membutuhkan sistem yang komprehensif dan pengawasan yang ketat. Namun, meskipun terdapat berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya penipuan, ada

sejumlah tantangan yang menghalangi efektivitas pengendalian fraud, baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang mempengaruhi operasional instansi pemerintah. Salah satu tantangan utama dalam pengendalian fraud di instansi pemerintah adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pengendalian internal di seluruh level organisasi. Banyak pegawai atau pejabat yang tidak sepenuhnya memahami risiko fraud dan akibat yang ditimbulkannya. Ketika budaya integritas dan akuntabilitas belum sepenuhnya terbentuk dalam suatu organisasi, maka potensi terjadinya fraud akan lebih tinggi. Selain itu, sebagian besar instansi pemerintah mungkin memiliki sumber daya yang terbatas untuk membangun sistem pengendalian internal yang kuat, sehingga mereka rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan wewenang.

Auditor internal memainkan peran krusial dalam pengendalian fraud, namun mereka juga menghadapi berbagai kendala yang menghambat kinerja mereka. Salah satu kendala utama yang dihadapi auditor internal adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun anggaran. Banyak instansi pemerintah yang hanya memiliki tim audit kecil, sementara tugas mereka sangat luas dan kompleks. Keterbatasan ini membuat auditor internal sulit untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di seluruh unit organisasi, sehingga beberapa potensi fraud mungkin terlewatkan.

Selain keterbatasan sumber daya, kendala lain yang sering dihadapi oleh auditor internal adalah kurangnya dukungan dari pihak manajemen atau pimpinan instansi. Di beberapa kasus, auditor internal tidak diberikan otonomi penuh dalam menjalankan tugas mereka, dan ada tekanan untuk tidak mengungkapkan temuan yang bisa merugikan pihak tertentu, seperti manajer atau pejabat tinggi. Situasi semacam ini mempengaruhi independensi auditor internal, yang seharusnya dapat bekerja tanpa pengaruh eksternal. Tanpa dukungan yang kuat, temuan yang seharusnya disorot mungkin tidak dilaporkan dengan tegas atau diabaikan, yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian fraud.

Selain kendala internal, pengendalian fraud di instansi pemerintah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi. Salah satu faktor eksternal yang paling signifikan adalah lingkungan hukum dan regulasi yang ada. Banyak instansi pemerintah yang menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan pengendalian fraud karena adanya kelemahan dalam sistem hukum yang mengatur pemberantasan fraud. Regulasi yang tidak tegas, tidak konsisten, atau bahkan tidak diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman sering kali menjadi penghalang dalam pengendalian fraud yang efektif. Selain itu, kondisi ekonomi dan politik juga memiliki dampak besar terhadap pengendalian

fraud. Dalam situasi ekonomi yang sulit, tekanan untuk memenuhi target atau mempertahankan anggaran sering kali mendorong praktik yang tidak transparan atau penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, situasi politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan instansi, yang bisa berakibat pada pengabaian atau pengurangan pengawasan terhadap aktivitas yang rawan fraud. Ketegangan politik, perubahan kebijakan yang sering terjadi, atau ketidakpastian dalam struktur pemerintahan juga dapat menciptakan peluang bagi fraud untuk berkembang.

Keterbatasan dalam penerapan teknologi juga menjadi faktor eksternal yang menghambat pengendalian fraud di instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah yang masih mengandalkan sistem manual dalam proses pengelolaan data dan transaksi, yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi dan penipuan. Dalam dunia yang semakin berkembang dengan teknologi informasi, sistem pengendalian internal yang tidak didukung oleh teknologi canggih akan kesulitan mendeteksi fraud dengan cepat. Oleh karena itu, penerapan sistem berbasis teknologi yang lebih canggih dan otomatis sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi fraud.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang teknologi bagi auditor internal dan pegawai lainnya juga dapat mengurangi efektivitas pengendalian fraud. Auditor internal yang tidak terampil dalam menggunakan perangkat lunak audit modern atau analisis data besar (big data) mungkin akan kesulitan dalam mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, instansi pemerintah perlu memperbarui infrastruktur teknologi mereka dan memastikan bahwa auditor internal dilengkapi dengan keterampilan teknologi yang sesuai untuk mengidentifikasi dan mencegah fraud secara lebih efektif.

Budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam pengendalian fraud di instansi pemerintah. Di banyak instansi, budaya yang kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas bisa mendorong perilaku yang tidak jujur atau tidak etis. Jika pegawai atau pejabat merasa bahwa tindakan fraud tidak akan mendapat konsekuensi yang berat, maka mereka mungkin merasa tidak ada risiko untuk melakukan penipuan. Dalam budaya seperti ini, meskipun terdapat sistem pengendalian internal yang baik, efektivitasnya akan terbatas karena tidak ada kesadaran yang kuat tentang pentingnya menjaga integritas di seluruh level organisasi.

Untuk itu, penguatan budaya integritas dan transparansi sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Ini dapat dilakukan dengan mengedukasi pegawai

dan pejabat mengenai pentingnya etika kerja, melibatkan mereka dalam pelatihan tentang pengendalian fraud, serta menerapkan kebijakan yang jelas mengenai sanksi bagi siapa saja yang terbukti terlibat dalam tindakan penipuan. Dengan budaya yang mendukung akuntabilitas dan integritas, pengendalian fraud akan lebih efektif, dan potensi penipuan dapat diminimalisir.

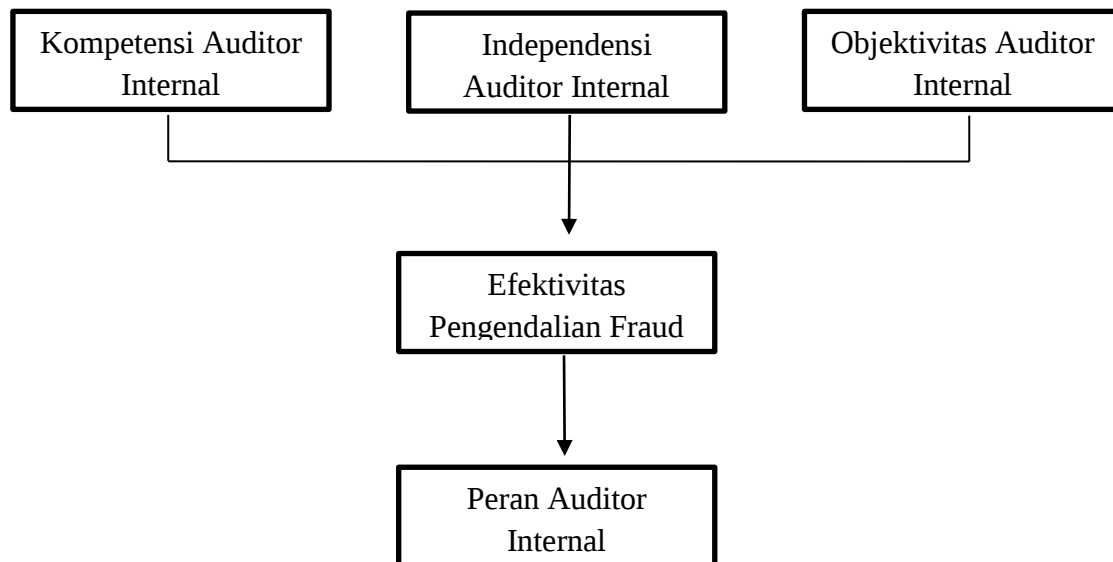
Kepemimpinan yang lemah atau tidak tegas juga merupakan faktor yang sering kali menghambat upaya pengendalian fraud. Tanpa dukungan yang jelas dari pimpinan instansi, pengawasan terhadap potensi fraud menjadi tidak maksimal. Pemimpin yang tidak menunjukkan komitmen terhadap pengendalian fraud dapat menciptakan suasana di mana pegawai merasa tidak termotivasi untuk melaporkan penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Jika pimpinan tidak memberi contoh yang baik dan tidak menerapkan kebijakan pengendalian internal secara konsisten, maka budaya organisasi yang mendukung pengendalian fraud juga tidak akan berkembang dengan baik.

Di sisi lain, kepemimpinan yang tegas dan berkomitmen terhadap pengendalian fraud akan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin yang aktif mendukung audit internal dan memberikan ruang bagi auditor untuk bekerja dengan independen akan meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap sistem pengendalian internal dan mendorong mereka untuk berperilaku jujur. Dengan demikian, pengaruh kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam memperkuat upaya pengendalian fraud di instansi pemerintah. Tantangan dalam pengendalian fraud di instansi pemerintah sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kendala yang dihadapi oleh auditor internal, keterbatasan sumber daya, serta pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan yang lemah, dapat menghambat upaya pencegahan dan deteksi fraud. Selain itu, faktor eksternal seperti kelemahan sistem hukum, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan teknologi turut mempengaruhi efektivitas pengendalian fraud. Oleh karena itu, penguatan pengendalian fraud memerlukan perhatian serius terhadap faktor-faktor ini, dengan fokus pada peningkatan kompetensi auditor, dukungan penuh dari pimpinan, dan pembaruan infrastruktur teknologi untuk mendeteksi penipuan secara lebih efektif.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam artikel ini mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian fraud di instansi pemerintah, dengan peran auditor internal sebagai pusat dari sistem pengendalian tersebut. Auditor internal diharapkan mampu

menjaga integritas sistem pengelolaan sumber daya negara dengan mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud. Keberhasilan pengendalian fraud bergantung pada kemampuan auditor untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko fraud yang ada dalam organisasi.



Gambar 1: Kerangka Konseptual

Kompetensi auditor internal merupakan faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas pengendalian fraud. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman auditor dalam memahami prosedur audit, teknik pengendalian, serta regulasi yang berlaku. Auditor yang kompeten dapat merancang prosedur audit yang tepat untuk mendeteksi potensi penipuan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, tingkat kompetensi yang tinggi memungkinkan auditor untuk mendeteksi penipuan dengan lebih cepat dan mengurangi risiko fraud.

Independensi auditor internal adalah faktor kedua yang memainkan peran penting dalam pengendalian fraud. Seorang auditor yang independen dapat menjalankan audit dengan objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa hasil audit mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan temuan yang dihasilkan dapat diandalkan. Tanpa independensi yang kuat, auditor bisa terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu, yang bisa merusak integritas dan keakuratan audit.

Objektivitas auditor internal menjadi faktor ketiga yang tidak kalah penting dalam efektivitas pengendalian fraud. Objektivitas berhubungan dengan kemampuan auditor untuk membuat evaluasi yang adil dan berdasarkan fakta, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan

pribadi atau tekanan eksternal. Auditor yang objektif akan menghasilkan temuan yang akurat dan dapat diandalkan, yang merupakan dasar untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki pengendalian fraud di instansi pemerintah. Ketiga faktor ini — kompetensi, independensi, dan objektivitas — bekerja secara sinergis untuk meningkatkan efektivitas pengendalian fraud, sehingga pengendalian internal di instansi pemerintah dapat dilakukan secara optimal.

D. KESIMPULAN

Pengendalian fraud di instansi pemerintah merupakan tantangan besar yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan manajerial, dan pengaruh budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi dapat mengurangi efektivitas pengendalian fraud. Selain itu, kendala eksternal seperti kelemahan dalam sistem hukum, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan teknologi turut mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Meskipun demikian, auditor internal memegang peran penting dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik untuk mencegah terjadinya penipuan. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar pengendalian fraud dapat dilakukan secara lebih efektif.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian fraud, instansi pemerintah perlu memperkuat kompetensi auditor internal dengan memberikan pelatihan berkelanjutan dan memastikan mereka memiliki akses ke teknologi audit yang memadai. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung transparansi, integritas, dan akuntabilitas, serta memastikan adanya dukungan penuh dari pimpinan untuk pengawasan yang independen dan objektif. Pemerintah juga harus memperbarui dan memperkuat regulasi yang mengatur pengendalian fraud, serta memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penipuan. Dengan langkah-langkah ini, pengendalian fraud di instansi pemerintah dapat diperkuat dan lebih efektif dalam mencegah kerugian negara akibat penipuan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Setiowati, D. P., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH KOMPETENSI INTERNAL, OBJEKTIVITAS, DAN INDEPENDENSI TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL. JURNAL ECONOMINA, 2(7), 1803–1815.

- <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.675>
- Farid, J. S. A., Hajering, Ikhtiari, K., & Muslim, M. (2022). Determinan Efektivitas Audit Internal Pemerintah. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 296–308. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i4.519>
- Limbong, T. E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCEGAHAN KECURANGAN: AUDIT INTERNAL, KESADARAN ANTI FRAUD, INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL. *JURNAL ECONOMINA*, 2(6), 1451–1461. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.631>
- Oktavian, A., & Cahya, Y. A. N. (2023). EFEKTIVITAS PERAN AUDIT INTERNAL DI MASA PANDEMI COVID 19. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 618–623. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.598>
- Istiyawati Rahayu, Ety Meikhati. "Peranan Audit Internal Dan Pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Yayasan Internusa Surakarta)." *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*, vol. 13, no. 01, 28 Jul. 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/115847-ID-peranan-audit-internal-dan-pencegahan-fr.pdf>
- Harefa, A. S. (2023). Peran Audit Sebagai Pengendali Internal dalam Mendeteksi Adanya Kecurangan Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 252–263. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4429>
- Ashadi, D., Deliana, & Kuntadi, C. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan : Kompetensi Auditor, Pengalaman Kerja Dan Objektivitas. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(1), 99–110. Retrieved from <https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/21>
- Abbott, L. J., Daugherty, B., Parker, S., & Peters, G. F. (2015). Internal Audit Quality and Financial Reporting Quality: The Joint Importance of Independence and Competence. *Journal of Accounting Research*, 54(1), 3–40. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12099>
- Afriyenti, M., & Sari, V. F. (2018). Kapan Profesi Auditor Internal Diminati? Pengujian Eksperimen terhadap Label Pekerjaan, Peran Auditor Internal, dan Prospek Karir. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i1.8979>
- Aisyiah, H. N., & Ahzar, F. A. (2017). Ex Ante Audit Sebagai Upaya Pencegahan Fraud. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 54–64. <https://doi.org/10.26740/jaj.v9n1.p54-64>
- Alwi, B. D., & Yuyetta, E. N. (2020). The Supply Side Factors Impact on the Effectiveness of Indonesian Government Internal Audit Function. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(3), 223–240. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i3.12736>
- Alzeban, A., & Sawan, N. (2015). The Impact of Audit Committee Characteristics on the Implementation of Internal Audit Recommendations. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 24, 61–71. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2015.02.005>
- Amalia, D., & Sarazwati, R. Y. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Intern. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 132–143. <https://doi.org/10.20961/jab.v17i2.217>